



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI HERMAWAN**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK**
3. NHK : **154401**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.972.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/110 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/90 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
3. Tanah Seluas 1885 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
4. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
5. Tanah Seluas 91 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, WARISAN Rp. 80.000.000
7. Tanah Seluas 595 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, WARISAN Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 1050 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, WARISAN Rp. 70.000.000
9. Tanah Seluas 1050 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **139.500.000**



1. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO TECHNO AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	135.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	44.000.000
Sub Total	Rp.	2.321.700.000
III. HUTANG	Rp.	35.301.908
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.286.398.092

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.